

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Ruang Lingkup Laporan Keuangan dan Perpajakan

###### 2.1.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan bahwa di dalam sebuah perusahaan ditemukan adanya kerja antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen selaku agen. Ketika terdapat pemisahan antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) di suatu perusahaan, maka terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Fakta ini dan kesadaran bahwa agen itu mahal, menetapkan landasan bagi sekelompok gagasan rumit namun bermanfaat yang disebut dengan teori keagenan (*agency theory*).

Menurut Irham Fahmi (2014:19-20) menyatakan bahwa:

“Teori keagenan merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti *profit* yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*). Implikasinya memungkinkan terjadinya sikap oportunistik (*opportunistic behaviour*) dikalangan manajemen perusahaan dalam melakukan beberapa tindakan yang sifatnya disengaja seperti:

- a. Melaporkan piutang tak tertagih (*bad debt*) yang lebih besar dari kenyataan yang sesungguhnya.
- b. Melaporkan hasil penjualan dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi.
- c. Malaporkan kepada pihak *principal* bahwa dibutuhkan dana tambahan untuk menunjang pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan jika tidak dibantu maka proyek akan terhenti.
- d. Melakukan *income smooting*, berupa melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, namun sesuai dengan maksud dan keinginan agen (manajemen).”

Menurut Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) bahwa:

“Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah muncul konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.”

Untuk mengatasi terjadinya konflik tersebut, harus ada tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan pemilik terhadap manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan seluruh sumber daya secara maksimal sehingga profitabilitas dapat meningkat.

Eisenhardt dalam Siagian (2011:11) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:

1. “Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).”

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi.

Teori keagenan mengimplikasi adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai *principal*. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang pemegang saham lainnya.

#### **2.1.1.2 Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Menurut Harahap (2002) dalam Nor Hadi (2011:93) menyatakan bahwa:

“Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), selanjutnya disebut tanggungjawab sosial (*social responsibility*). Fenomena seperti ini terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi.”

Dengan begitu tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.

Menurut Hummels (1998) dalam Nor Hadi (2011:45) menyatakan bahwa:

*“... (stakeholder are) individual and group who have legitimate claim on the organization to participate in the decision making process simply because they are affected by the organization practices, policies, and actions.”*

Menurut Jones, Thomas, dan Andrew (1999) dalam buku Nor hadi (2011:94) menyatakan bahwa pada hakikatnya *stakeholder theory* mendasarkan diri pada asumsi, antara lain:

1. *“The corporation has relationship with many constituency groups (stakeholder) that effect and are affected by his decisions.*
2. *The theory is concerned with nature of these relationship in terms of both processes and outcomes for the firm and its stakeholder.*
3. *The interest of all (legitimate) stakeholder have intrinsic value and no set of interest is assumed to dominate the others.*
4. *The theory focusses on managerial decision making.”*

Adam C.H (2002) dalam Nor Hadi (2011:95) menyatakan:

*“Berdasarkan asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, yaitu usaha dan jaminan going concern.”*

Pada dasarnya *stakeholder* dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan yang ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut. Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan

untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, ketika *stakholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakholder*.

### **2.1.1.3 Akuntansi**

#### **2.1.1.3.1 Definisi Akuntansi**

Pengertian akuntansi menurut Hanafi dan Abdul Halim (2014:27), definisi akuntansi adalah:

“... sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penelitian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah:

*“Accounting consist of the three basic activities –it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement.”*

Menurut Rudianto (2012:15) pengertian akuntansi adalah:

“... sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Berdasarkan dari beberapa definisi akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengubah data menjadi sebuah transaksi yang menghasilkan informasi laporan keuangan melalui proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

#### **2.1.1.3.2 Bidang-Bidang Akuntansi**

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi antara lain:

1. “Akuntansi Keuangan  
Yaitu bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen  
Yaitu akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya  
Yaitu akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan  
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara objektif.

5. Sistem Akuntansi

Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

6. Akuntansi Perpajakan

Yaitu bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Akuntansi Anggaran

Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.

8. Akuntansi Organisasi Nirlaba

Yaitu bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain.”

#### **2.1.1.4 Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“... menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu.”

Sedangkan laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2015:21) adalah:

“... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

#### **2.1.1.4.1 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah:

“Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter.”

Sedangkan menurut Kasmir (2013:11) tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

#### 2.1.1.4.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2016:8) karakteristik utama laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Dapat dipahami  
Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh penggunanya. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal, dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah ilmu keuangan atau industri yang sulit dipahami orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.
2. Relevan  
Informasi yang ada di laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialistis.
3. Dapat dipercaya  
Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan handal dan dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.
4. Dapat dibandingkan  
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan dengan cara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding. Laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.”

#### 2.1.1.4.3 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

1. “Neraca (*balance sheet*)
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
3. Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)
4. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*).”

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adri (2012:30) adalah sebagai berikut:

1. “Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*) selama periode.
2. Laporan perusahaan ekuitas (*statement of financial position*) pada akhir periode.
3. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) pada akhir periode.
4. Laporan arus kas (*statement of cash flow*) selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

#### 2.1.1.4.4 Analisis Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan, melakukan analisis laporan keuangan merupakan hal yang penting. Rasio keuangan dapat membantu dalam mengukur keberhasilan perusahaan. Selain itu juga dapat menilai baik buruknya keputusan

yang diambil. Kemakmuran pemegang saham tergantung pada keputusan-keputusan keuangan yang baik.

Untuk melakukan analisis ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan prestasi suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya kecenderungan selama periode tertentu. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri itu sehingga dapat diketahui bagaimana posisi perusahaan dalam industri. Menurut Agus Sartono (2010:122) rasio keuangan dibagi menjadi empat yaitu:

1. “Rasio likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.
2. Rasio aktivitas, menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan.
3. *Financial Leverage ratio*, menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Rasio profitabilitas, dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri.”

#### **2.1.1.5 Pajak**

##### **2.1.1.5.1 Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Siti Resmi (2014:2) definisi pajak adalah:

“... prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Menurut P. J. A. Andriani dalam Agus Sambodo (2015:4):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.1.5.2 Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair*(Sumber Keuangan Negara)  
Artinya pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

### 2.1.1.5.3 Jenis-jenis Pajak

Ada tiga jenis pengelompokan pajak menurut Sukrisno Agoes (2014:7)

antara lain:

1. “Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut objeknya, pajak dikeompokkan mejadi dua yaitu:
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilakukan dengan mencari syarat

- objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
    - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
    - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **2.1.1.5.4 Definisi Beban Pajak Penghasilan**

Menurut PSAK 46 Pajak Penghasilan Paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah:

“... jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pajak penghasilan merupakan jumlah gabungan dari pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan pada satu periode atau periode mendatang.

#### **2.1.1.5.5 Manajemen Pajak**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan seperti

yang diketahui bahwa tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh karena itu perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Menurut Pohan (2013:3) salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu pengurang laba.

Menurut Pohan (2013:13), manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Sedangkan menurut Hutagaol (2007:215), manajemen pajak adalah:

“Proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh *tax manager* untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Menurut Pohan (2013:10), strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. “Penghematan pajak (*tax saving*).
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Penundaan pembayaran pajak.

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.”

## **2.1.2 Profitabilitas**

### **2.1.2.1 Definisi Profitabilitas**

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Berikut ini pengertian profitabilitas menurut para ahli:

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:304) profitabilitas adalah:

“... menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya.”

Menurut Agus Sartono (2015:122) profitabilitas adalah:

“... kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

Adapun pengertian profitabilitas menurut Dr. S.K. Singh (2016:334) adalah sebagai berikut:

*“Profitability refers to the ability of a bussiness to earn profit. It show the efficiency of the bussiness. These measure the profit earning capacity of the company.”*

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada.

#### **2.1.2.2 Definisi Rasio Profitabilitas**

Menurut Irham Fahmi (2013:135) pengertian rasio profitabilitas adalah:

*“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.”*

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:245) rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

*“Profitability ratio is a ratio that measure of the degree of success or failure of a given company or division for a given period of time.”*

Menurut Hery (2016:192) menyatakan bahwa:

*“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya.”*

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari penjualan serta aktivitas bisnis dalam suatu periode dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Rasio profitabilitas biasa digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam menanamkan sahamnya diperusahaan. Bila perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya.

### **2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan terutama bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan dari rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197):

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

Selain itu tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut

Hery (2016:192) yaitu:

1. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besarnya jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.”

#### 2.1.2.4 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2015:122) terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu:

1. “*Gross Profit Margin*

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{penjualan} - \text{HPP}}{\text{penjualan}}$$

Semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik. *Gross profit margins* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu pula sebaliknya.

2. *Net profit margin*

$$\text{NPM} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

Apabila *gross profit margin* selama suatu periode tidak berubah sedangkan *net profit margin* mengalami penurunan maka itu berarti biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan.

3. *Return On Investment (ROI)*

$$ROI = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total aktiva}}$$

*Return on investment* atau *return on assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.

4. *Return On Equity (ROE)*

$$ROE = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{modal sendiri}}$$

*Return on equity* atau *return on net worth* mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar.

5. *Profit margin*

$$\text{profit margin} = \frac{EBIT}{\text{penjualan}}$$

Dengan menggunakan hubungan antara perputaran aktiva dengan *net profit margin* maka dapat dicari *earning power* atau *return on assets ratio*. *Earning power* adalah hasil kali *net profit margin* dengan perputaran aktiva.

6. *Earning power*

$$\text{earning power} = \frac{\text{penjualan}}{\text{total aktiva}} \times \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

*Earning power* merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva. Apabila perputaran aktiva meningkat dengan *net profit margin* tetap maka *earning power* juga akan meningkat. Dua perusahaan akan mempunyai *earning power* yang sama meskipun perputaran aktiva dan *net profit margin* keduanya berbeda.”

Dalam penelitian ini alat ukur profitabilitas yang digunakan penulis adalah *Return On Assets (ROA)*, karena ROA bisa menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Apabila nilai ROA yang diraih oleh perusahaan semakin tinggi maka semakin baik pula performa

keuangan perusahaan, semakin baik pengelolaan aset perusahaan maka semakin besar juga laba yang akan diperoleh perusahaan.

#### **2.1.2.5 Return On Assets**

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:518) *Return On Assets* adalah:

*“Ratio between net profit after tax and interest to the amount of sales of the company.”*

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2015:137) ROA adalah:

“... rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.”

Dari definisi yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari manajemen aset yang tersedia.

### **2.1.3 Corporate Social Responsibility**

#### **2.1.3.1 Pengertian Corporate Social Responsibility**

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan diartikan sebagai:

“... komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Menurut Rahmawati (2012:180) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“... mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam tanggungjawab operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum.”

Menurut Fitariyani (2016) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“...suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggungjawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar perusahaan itu berada.”

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya sambil memperhatikan kepentingan *stakholder* guna meningkatkan taraf ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

### **2.1.3.2 Pengertian Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Dwi Kartini (2013:56) pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah:

“... cara pemberian informasi dan pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap *stakeholders*. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan, serta meningkatkan legitimasi *stakeholders*.”

Menurut Rakiemah (2009) pengungkapan *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai:

“... suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability*, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media seperti laporan keuangan tahunan maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial”.

Sedangkan definisi menurut Rahmawati (2012:183) bahwa:

“Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan suatu proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah suatu proses pemberian informasi kepada *stakeholders* atau masyarakat luas, terkait dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan terkait.

### **2.1.3.3 Faktor-Faktor Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Deegan dalam Ujang Rusdianto (2013:44) ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*-nya, yaitu:

1. “Keinginan untuk memenuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

7. Untuk mengukur kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.”

#### **2.1.3.4 Ruang Lingkup Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Brodshaw dan Vogel dalam Busyra Azheri (2012:36) ada tiga dimensi yang harus diperhatikan sehubungan dengan ruang lingkup CSR yaitu:

1. “*Corporate Philantrophy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. *Corporate responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggungjawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate Policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.”

#### **2.1.3.5 Manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Rusdianto (2013:13) terdapat manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

1. “Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi merek perusahaan.

5. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
6. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
7. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk mangement*).”

### 2.1.3.6 Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan *corporate social responsibility* dihitung berdasarkan standar GRI-G4. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsisten yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat.

GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu atau pelaporan *online*. Jenis pendekatan pengukuran GRI-G4 melalui isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian tanggungjawab sosial yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) yang diperoleh dari *website* [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org).

Dalam standar GRI-G4 (2013) indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama yaitu:

1. “Indikator Kinerja Ekonomi (*Economic Performance Indicator*).
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Indicator*).
3. Indikator Kinerja Sosial (*Social Performance Indicator*), terdapat 4 aspek yaitu:

- Indikator Kinerja Praktek Kerja dan Kelayakan Kerja (*Labor Practices and Decent Work Performances Indicator*).
- Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*Human Rights Performance Indicator*).
- Indikator Kinerja Masyarakat (*Society Performance Indicator*).
- Indikator Kinerja Tanggungjawab Atas Produk (*Product Resonsibility Performance Indicator*).”

**Tabel 2.1**  
**91 Indikator Pengungkapan CSR Berdasarkan GRI-G4**

KATEGORI	KODE	KETERANGAN
<b>KATEGORI EKONOMI</b>		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
	EC2	Implikasi finansial dan resiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi imbalan pasti.
	EC4	Bantuan finansial yang diterima pemerintah.
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula ( <i>entry level</i> ) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
	EC6	Perbandingan manajmen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak.
Praktik Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pemasok lokal di operasional yang signifikan.
<b>KATEGORI LINGKUNGAN</b>		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat dan volume.
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi.
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi.

	EN5	Intensitas energi.
	EN6	Pengurangan konsumsi energi.
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air.
	EN10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali.
	Keanekaragaman hayati	EN11
EN12		Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dikawasan lindung.
EN13		Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
EN14		Jumlah total spesies dalam IUCN <i>RED LIST</i> dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat resiko kepunahan.
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1).
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2).
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3).
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO).
	EN21	$NO_{x0}$ dan $SO_x$ dan emisi udara signifikan lainnya.
Efluen dan limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
	EN23	Bobot total berdasarkan jenis metode dan pembuangan.
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan.

	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan Besel 2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut impor, diekspor atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
Produk dan jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori.
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja.
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensi dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
<b>KATEGORI SOSIAL</b>		
<b>Sub kategori : Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja</b>		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan <i>turnover</i> karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purna waktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu,

		berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat resistensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama.
Kesehatan dan keselamatan kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko tinggi karena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian formal serikat pekerja.
	LA9	Jam pelatihan rata-rata pertahun karyawannya menurut gender dan menurut kategori karyawan.
Pelatihan dan pendidikan	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karir secara regular menurut gender dan kategori karyawan.
Keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan perkategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya.
Kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki	LA13	Rasio gaji dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan.

Asesmen pemasok terkait ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan praktik ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi.
<b>KATEGORI SOSIAL</b> <b>Sub kategori : Hak Asasi Manusia</b>		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan/prosedur HAM terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi.
Non diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
Kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.
Pekerja paksa atau wajib kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
Praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur HAM di organisasi yang relevan dengan operasi.
Hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan

		tindakan yang diambil.
Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan <i>review</i> atau asesmen dampak hak asasi manusia.
Asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme pengaduan masalah hak asasi manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan formal.
<b>KATEGORI SOSIAL</b> <b>Sub kategori : Masyarakat</b>		
Masyarakat lokal	SO1	Persentase operasi dengan melibatkan masyarakat lokal, dampak, dan pengembangan.
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
Anti korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap resiko terkait dengan korupsi dan resiko signifikan yang teidentifikasi.
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi.
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
Kebijakan publik	SO6	Niali total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat.
Anti persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti trust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
Asesmen pemasok dampak terhadap masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat.
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang

		diambil.
Mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
<b>KATEGORI SOSIAL</b>		
<b>Sub kategori : Tanggungjawab atas produk</b>		
Kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan.
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap kepatuhan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil.
Pelabelan produk dan jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti informasi sejenis.
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil.
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan.
Komunikasi pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau yang disengketakan.
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor menurut jenis hasil.
Privasi pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org) (2013)

Item-item pengungkapan *corporate social responsibility* tersebut diukur dengan menggunakan *CSR index*, yang diungkapkan dalam *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan: 
$$CSRI_j = \frac{X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

$CSRI_j$  : *Corporate Social Responsibility Index* perusahaan j.

$\sum X_{ij}$  : jumlah *item* yang diungkapkan oleh perusahaan j, nilai 1 jika *item* i diungkapkan; nilai 0 jika *item* i tidak diungkapkan.

$N_j$  : jumlah *item* untuk perusahaan j,  $n_j \leq 91$

## 2.1.4 Agresivitas Pajak

### 2.1.4.1 Definisi Agresivitas

Menurut Schneiders dalam Kiswarawati (1992, h. 10) mendefinisikan “agresif sebagai suatu bentuk respon yang mencari pengurangan ketegangan dan frustrasi melalui perilaku yang banyak menuntut, memaksa, dan menguasai orang lain.”

Sedangkan menurut Moore dan Fine dalam Koeswara (1988, h. 5) mendefinisikan “agresif sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik maupun secara verbal terhadap individu ataupun terhadap objek-objek.”

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa agresivitas adalah tingkah laku kekerasan secara fisik maupun verbal yang dilakukan secara sengaja terhadap individu ataupun terhadap objek-objek dengan cara menuntut, memaksa, dan menguasai orang lain.

#### 2.1.4.2 Definisi Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang umum terjadi di perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan, yang akhirnya perusahaan melakukan agresivitas pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Menurut Lanis dan Richardson (2012), agresivitas pajak adalah:

*“Tax aggressiveness as the downward management of taxable income through tax planning activities. It thus encompasses tax planning activities that are legal or that may fall into the gray area, as well as activities that are illegal.”*

Menurut Suyatno dan Supramono (2012:170), agresivitas pajak adalah:

“... suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*.”

Menurut Frank et.al (2009) menyatakan bahwa:

*“Aggressive act of taxation as an act which aims to derive fiscal profit through tax planning, either in a manner that is deemed or not considered an act of tax avoidance”.*

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak secara legal atau ilegal agar perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya dengan cara menekan beban pajak yang dibayarkan seminimal mungkin.

Menurut Pohan (2013:9) ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya:

1. “Tingkat kerumitan suatu peraturan  
Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak yang terutang  
Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. Biaya untuk negosiasi  
Disengaja atau tidak, kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Resiko deteksi  
Berhubungan dengan tingkat profitabilitas, apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko deteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya jika suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.”

#### **2.1.4.3 Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak**

Menurut Hidayanti dan Laksito (2013), tindakan pajak agresif dapat memberikan keuntungan bagi pelaku penghindaran pajak, yaitu:

1. “Keuntungan berupa penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang diperoleh pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manajer yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah manajer mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction*.”

Selain memberikan keuntungan, tindakan pajak agresif juga memberikan kerugian bukan hanya bagi penerimaan pajak negara tetapi juga bagi perusahaan

yang melakukannya. Menurut Hidayanti dan Laksito (2013) tindakan pajak agresif memberikan kerugian yaitu:

1. “Kemungkinan perusahaan akan mendapatkan sanksi dari fiskus pajak dan turunnya harga saham perusahaan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajer dalam rangka *rent extraction*.
4. Terhambatnya keberlangsungan perusahaan.”

#### 2.1.4.4 Metode Pengukuran Agresivitas Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi yang disajikan dalam Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Metode Pengukuran Agresivitas Pajak**

No	Proksi Pengukuran	Rumus Perhitungan
1	ETR	$\frac{\text{income tax expense}}{\text{pre tax income}}$
2	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre tax accounting income}}$
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash income taxes paid}}{\text{worldwide total pre tax accounting income}}$
4	<i>Long-run Cash ETR</i>	$\frac{(\text{worldwide cash taxes paid})}{(\text{worldwide total pre tax accounting income})}$
5	<i>ETR Differential</i>	Statutory ETR – GAAP ETR
6	<i>DTAX</i>	<p><i>Error term from the following regression:</i></p> $\text{ETR differential} \times \text{Pre tax book income} = a + bx$ <p style="text-align: center;"><i>controls + e</i></p>

7	<i>Total BTD</i>	<i>Pre tax book income</i> $-\frac{U.S\ CTE+Fgn\ CTE}{U.S.STR}(NOL_t - NOL_{t-1})$
8	<i>Temporary BTD</i>	$\frac{Deferred\ tax\ expense}{U.S.STR}$
9	<i>Abnormal Total BTD</i>	<i>Residual from</i> $\frac{BTB}{TAit} = \beta TAit + \beta mi + eit$
10	<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>
11	<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variabel for firms accused of engaging in a tax shelter</i>
12	<i>Marginal Tax Rate</i>	<i>Simulated Marginal Tax Rate</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus ETR yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan. Alasan menggunakan rumus ETR karena beberapa penelitian sebelumnya juga menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak. Rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{income tax expense}}{\text{pre tax income}}$$

### 2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian empiris yang telah dilakukan untuk melihat hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan *corporate social responsibility* dalam hubungannya dengan agresivitas pajak. Berikut penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai referensi.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Michelle H and Joel Slemrod (2008)	<i>What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reaction to news about tax shelter involvement</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Agresivitas Pajak memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham.
2	Balakrishnan and Blouin (2011)	<i>Does tax aggressiveness reduce financial reporting transparency?</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Agresivitas pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap transparansi keuangan.
3	Roman Lanis and Grant Richardson (2012)	<i>Corporate Social Responsibility and tax aggressiveness:an empirical analysis</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
4	Yoehana (2013)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Agresivitas Pajak	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
5	Ardyansah dan Zulaikha (2014)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> , dan Komisaris	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Size</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . Sedangkan <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , dan <i>Capital</i>

		Independen Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	<i>Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> . Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> .
6	Nona Fajar Rina (2015)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , ROA, dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak.	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan ROA, dan Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
7	Irvan Tiaras dan Henryanto (2015)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas pajak. Manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan

			terhadap agresivitas pajak.
8	Novia Bani Nugraha (2015)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak.	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Profitabilitas memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
9	Juniati Gunawan (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak.	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
10	Mustika (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh

		<i>Leverage, Capital Intensity,</i> dan Kepemilikan Keluargaterhadap Agresivitas Pajak.	terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas, <i>leverage,</i> dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
--	--	---	---

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Perusahaan yang pada umumnya adalah komersial yang bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya akan merasa sangat dirugikan dengan adanya tarif pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana laba yang diperoleh akan semakin kecil dengan adanya biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Karena tujuan perusahaan untuk meminimumkan pembayaran pajak maka timbul ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau manajemen perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. (Suyatno dan Supramono, 2012:170). Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka dianggap semakin agresif.

Menurut Pohan (2013:9) ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya:

1. “Tingkat kerumitan suatu peraturan  
Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak yang terutang  
Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. Biaya untuk negosiasi  
Disengaja atau tidak, kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Resiko deteksi  
Berhubungan dengan tingkat profitabilitas, apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko deteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya jika suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.”

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas dan pengungkapan *corporate social responsibility*.

Dari penjelasan tersebut, adapun pengaruh dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak**

Profitabilitas dapat diukur menggunakan *return on assets* (ROA). Semakin tinggi ROA maka laba yang dihasilkan juga tinggi. Laba menjadi dasar tarif pajak, apabila laba tinggi maka beban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin meningkat dan mengakibatkan nilai *effective tax rate* sebagai pengukur agresivitas pajak juga tinggi (Lanis dan Richardson, 2012).

Menurut Pohan (2013:3) hubungan antara profitabilitas dengan agresivitas menyebutkan bahwa:

“Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan meminimalkan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurangan laba. Besarnya beban pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang ditanggung. Maka dari itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.”

Pernyataan tersebut didukung oleh Nona Fajar Rina (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan sehingga ada kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak.

### **2.2.2 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak**

Teori *stakeholder* menyebutkan bahwa perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga memberikan manfaat untuk *stakeholdernya*. Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan para *stakeholder*. Pengungkapan CSR merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapat dukungan dari para *stakeholder* dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan.

Menurut Fionasari (2017), “... dengan meningkatnya beban pajak, perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. Apabila perusahaan melakukan

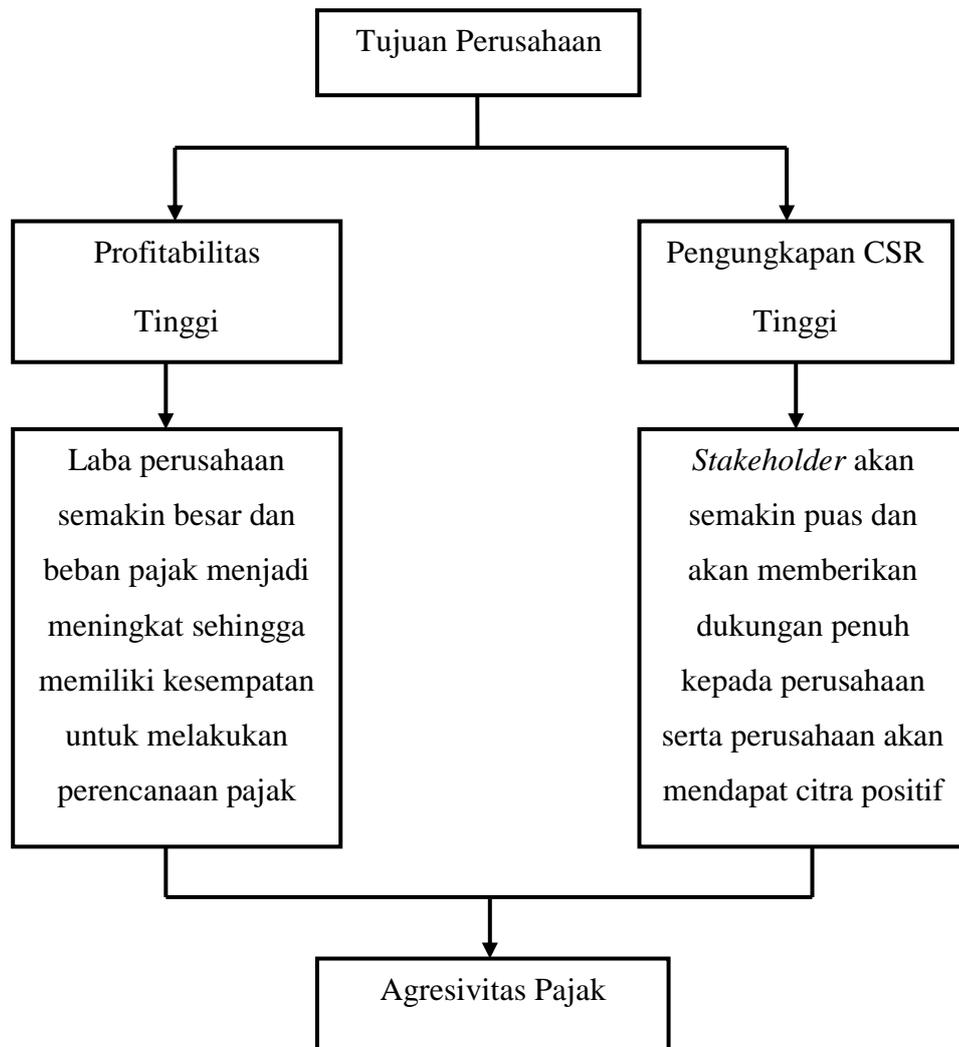
celah tersebut untuk menghindarinya, maka perusahaan tersebut dianggap tidak bertanggungjawab sosial.”

Sedangkan menurut Octaviana (2014) hubungan antara *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

“Selama ini perusahaan dianggap memiliki dua beban yaitu beban pajak penghasilan dan beban CSR. Kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Supaya perusahaan tidak memiliki dua beban, maka perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara melakukan agresivitas pajak. Tindakan itu tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menutupi tindakannya perusahaan melakukan tanggungjawab sosial yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengubah persepsi dan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat.”

Pernyataan tersebut didukung oleh Lanis dan Richardson (2012), Novia Bani Nugraha (2015), I Dewa Ayu Intan (2015), Mustika (2017), serta Juniati Gunawan (2017) yang menyatakan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang mengungkapkan CSR lebih lengkap, maka perusahaan tersebut cenderung melakukan agresivitas pajak. Karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan cara melakukan pengungkapan CSR yang lebih lengkap.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:97), hipotesis penelitian adalah:

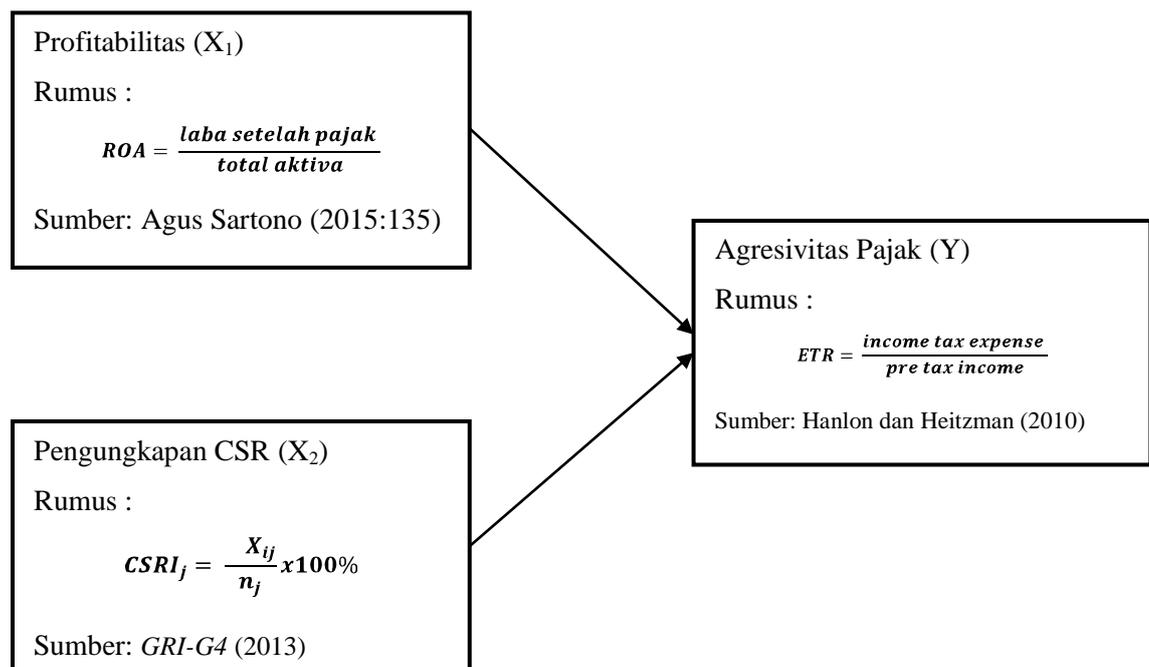
“Jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 :Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Hipotesis 2 :Terdapat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Hipotesis 3 :Terdapat pengaruh profitabilitas dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.



**Gambar 2.2 Paradigma Penelitian**